

Hal
Lampiran

- : Pernyataan Sikap Wartawan.
- : 1. Kronologi
- 2. Daftar Penandatanganan

Kepada Yth
Kapolres Bantul
di Bantul

PERNYATAAN SIKAP WARTAWAN

Sehubungan dengan **penganiayaan** terhadap Saudara Fuad Muhammad wartawan Harian Bernas Yogyakarta dengan wilayah liputan Kabupaten Bantul Di Selasa(13/8) malam oleh orang yang belum diketahui identitasnya, sehingga Saudara S, mengalami luka parah dan akhirnya **meninggal dunia** di RS Bethesda Yogyakarta, Jumat sore, kami wartawan Indonesia dengan ini menyatakan sikap:

Pertama, menyatakan sangat berduka dan prihatin atas tindak biadab tersebut, yang diduga kuat berlatar belakang tugas kewartawannya, untuk meliput peristiwa-peristiwa dan aktivitas yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Terlebih lagi, sungguh memprihatinkan bahwa rekan dan saudara kami, mengalami hal tersebut tepat pada hari ulang tahun 51, kemerdekaan Republik Indonesia, usia yang seharusnya sudah cukup matang bagi bangsa ini untuk hidup di atas landasan moral dan hukum.

Kedua, bagi kami, kematian rekan dan saudara kami Fuad Mohammad Syafruddin tersebut adalah dorongan moral dan inspirasi yang tidak akan kering untuk terus menggelorakan perjuangannya, untuk menyampaikan dan membela kebenaran kepada masyarakat luas, serta meretas segala bentuk ketidakadilan dan kebusukan yang terjadi di muka bumi ini.

Ketiga, sebagai negara yang dibangun di atas dasar hukum, kami wartawan Indonesia, meminta kepada segenap lapisan aparat hukum, khususnya yang terkait langsung yaitu Kepolisian Resort Bantul, untuk mengusut secara tuntas kasus pembunuhan tersebut. Pemecahan masalah yang tidak tuntas, merupakan preseden buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Keempat, minta kepada pihak berwajib untuk tidak menutup-nutupi hasil pengusutan dan mengungkapkan hasil pengusutan yang sebenarnya kepada masyarakat melalui media massa cetak maupun elektronik.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Agustus 1996
Kami Yang Berduka Cita

Wartawan Indonesia

Tembusan kepada Yth:

1. Kapolwil Yogyakarta
2. Kapolda Jateng
3. Kapolri
4. Bupati KDH Tingkat II Bantul
5. Gubernur DIY
6. Mendagri
7. Danrem 072/Pamungkas
8. Pangdam IV/Diponegoro
9. Ketua PWI Cabang Yogyakarta
10. Ketua PWI Pusat
11. Kakanwil Deppen DIY
12. Menteri Penerangan RI
13. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
14. Lembaga Swadaya Masyarakat
15. Pimpinan Redaksi Media Massa Nasional dan Asing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Fuad Muhammad Syafruddin
Tempat/Tgl Lahir	: Bantul, 18 Februari 1963
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wartawan SKH BERNAS
Alamat	: Gedongan, Trirenggo, Bantul
Mulai Bekerja Di SKH BERNAS	sejak 1 Juli 1986,
Nama Ayah	: Dzuchoti (61)
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Ibu	: Musilah (56)
Pekerjaan	: Petani
Istri	: Marsiyem (28)
Pendidikan	: SMEA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Menikah	: 8 Januari 1988
Anak	: 1. Zulaikha Dita Krisna (8) 2. Zulkarnaen Wikanjaya (3)
Saudara Kandung	: 1. Suryanto (36), anggota DPRD Bantul 2. FM Sholahudin (27) 3. Nur Fayuhan (24) 4. Syamsumu'in (19) 5. Fachuddin (16) 6. Istiqomah (14)

Jenis Pekerjaan Yang disukai almarhum : Wartawan

"Wartawan adalah pekerjaan yang mulia, menantang, menuntut pengalaman, wawasan yang luas dan keberanian. Yakni keberanian yang dibimbing dengan keyakinan tentang kebenaran. Nurani manusia akan diasah, apakah ia dekat dengan nurani dan kebenaran ataupun mengingkari nuraninya"

Meninggal Jumat, 16 Agustus 1996, pukul 16.57 WIB di RS Bethesda setelah koma selama 4 hari sejak Selasa 13 Agustus 1996, karena penganiayaan.

Beberapa tulisan Fuad M Safruddin yang dimuat Harian *Bernas* dan membuat ejabat merah telinga:

Tanggal 26 Juli 1996

Judul berita, Di desa Karangtengah, Imogiri, Bantul: Dana IDT Hanya diberikan separo.

Proses penerimaan dana IDT di desa karangtengah, Imogiri, Bantul kembali dikeluhkan anggota Pokmas. Tiap Pokmas di desa yang berjumlah 18 buah itu dananya dipotong Rp 10 ribu yang dikatakan sebagai biaya administrasi. Bahkan beberapa anggota Pokmas yang enggan disebutnamanya mengungkapkan kalau baru menerima dana 50 persen dari jumlah yang seharusnya diterima.

Tanggal 29 Juli 1996

Judul berita, "Kalau Ada yang sunat IDT, saya tempeleng"

Kabar adanya penyunatan dana IDT membuat Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo berang. Ia berjanji akan menindak tegas kalau terbukti ada perangkat yang melakukan pemotongan dana tersebut.

"Lha wong program IDT yang dikelola secara benar saja belum tentu berhasil dengan baik, ini malah disunat. Kalau benar ada aparat yang terlibat, biar saya tempeleng nanti. Sekarang sudah saya perintahkan ceking," tegas Sri Roso.

Tanggal 31 Juli 1996

Judul berita, Kades diganti, sertifikat tanah 2 warga terbengkalai.

Pergantian Kepala Desa Trihanggo, Gamping, Sleman mengakibatkan Ahmad Zawani (35) penduduk dusun Blambangan Rt 04 Rw 19 desa Trihanggo dan Hadi Prayitno (67) warga Jatimulyo, Tegalrejo, Yogyakarta kesulitan mensertifikatkan tanah yang dibelinya. Sehingga keduanya mengadu ke LBH Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal semua persyaratan yang diwajibkan sudah dipenuhi, namun masih terbengkalai.

Winarta, staf LBH mengungkapkan pihaknya selaku kuasa hukum 2 warga terus berusaha memperjelas kasus tersebut. "Kalau cara kekeluargaan tidak bisa ditempuh, ya kami akan menggunakan dengan cara hukum," ungkap Winarta. Dijungkapkan oleh Winarta bahwa julu beli tanah berstatus *wedhi kengser* dilakukan tahun 1972 dengan harga Rp 50 per meter persegi. Orang tua Zawani membeli tanah itu kepada Kades Muh Umar seluas 1.500 m² dan menyerahkan uang Rp 100 ribu, namun kuitansi pembelian diminta oleh Kadus Baturan, Trihanggo, Sleman. Ketika ditanya ke kantor desa, Sekdes Trihanggo hanya memberi kuitansi lama dengan nilai uang tertera Rp 49 ribu. Tahun 1978 Sekdes melalui kepala dusunnya meminta uang Rp 150 ribu yang dikatakan untuk menyelesaikan urusan jual beli tanah tersebut dan dilunasi. Tetapi tak ada penyelesaian. Sedangkan Hadi Prayitno membeli seluas 2.000 m².

Tanggal 2 Agustus 1996

Judul berita, Kepala Itwilcab: Tak ada penyunatan dana IDT.

Kepala Itwilcab Bantul Tohayadi BA mengungkapkan kalau hasil penyelidikan kasus dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) di Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul oleh Itwilcab tak ditemukan adanya penyimpangan.

Dalam kasus itu terungkap, kalau dana IDT yang diserahkan ke masing-masing

kelompok masyarakat (Pokmas) setiap Pokmas harus menyerahkan Rp 10 ribu. Padahal di desa Karangtengah terdapat 18 Pokmas. Berkaitan dengan persoalan tersebut Tohayadi mengungkapkan kalau dana itu tidak merupakan penyunatan, tetapi sudah merupakan kesepakatan seluruh anggota untuk menyetor uang sebesar itu untuk biaya upacara penyerahan. Sedangkan menurut beberapa anggota Pokmas, setelah kabar adanya pemotongan dana Rp 10 ribu, mereka dikumpulkan terus di Balai desa setempat. Dan ditanya oleh Camat Imogiri, penyerahan Rp 10 ribu dari kelompok itu ikhlas atau tidak dan saat itu tidak ada warga yang mengatakan tidak ikhlas.

Tanggal 2 Agustus 1996

Judul berita Tim Advokasi DPW PPP DIY akan selesaikan kasus tanah di Guwosari.

Kasus jual beli tanah yang dilakukan seorang warga desa Guwosari, Pajangan, Bantul, padahal warga tersebut tidak berhak menjualnya akan diselesaikan secara tuntas oleh tim advokasi.

Jual beli tanah itu diduga melibatkan seorang perangkat desa setempat.

Tanggal 2 Agustus 1996

Judul berita, Herlambang akhirnya dihukum penjara 7 bulan.

Herlambang Jati (36) terdakwa kasus penipuan dengan cara menyelenggarakan proyek penggemukan sapi fiktif akhirnya dijatuhi hukuman penjara 7 bulan dan membayar denda Rp 1.000 dalam persidangan yang dipimpin hakim Ny Endang Srimurwati SH dengan anggota Suparno SH dan Untung Widarto SH.

Menurut majelis, terpidana telah melakukan serangkaian perbuatan penipuan. Dengan perkataan bohong, Herlambang mengelabuhi saksi korban Cipto Suwarno dan Ngadiran agar menyerahkan beberapa ekor sapi yang gemuk-gemuk untuk dipamerkan kepada Menpora Hayono Isman yang sekaligus meresmikan percobaan proyek penggemukan sapi. Peresmian dilakukan tanggal 18 Maret 1995. Kepada saksi, terpidana mengatakan akan memberi bagian sepertiga dari bantuan Menpora yang berjumlah Rp 150 juta, sehingga korban merasa tertarik dan menyerahkan sapi-sapinya.

Tanggal 9 Agustus 1996

Perihal Kasus di Guwosari, Pajangan, Bantul. Kasus ini bermula dari laporan M Sugeng, warga dusun Dukuh dan Hj Lasinem warga dusun gandekan, keduanya masuk Kecamatan Pajangan Bantul. Sugeng dalam laporannya ke Polres Bantul mengungkapkan kalau tanah miliknya yang dalam letter C nomor 1407 dengan luas 19.350 m², setelah digunakan proyek Perumnas luasnya tinggal 15.545 m². Sedangkan Hj Lasinem juga mengungkapkan hal serupa, yaitu menyusutnya luas lahan miliknya yang semula luas 7.280 m² menjadi 1.022 m².

Ketika ditanyakan kepada perangkat desa setempat tidak diperoleh kejelasan yang kongkrit. Bahkan berkait dengan berita tersebut Kades Guwosari M Zainuri diperiksa oleh petugas Polres Bantul, Jumat 9 Agustus 1996.

Soal Pencalonan Bupati Bantul

15/96

Banyak "Invisible Hand" Pengaruh Pencalonan

Bantul, Bernas

Soal ditolaknya usulan bakal calon Bupati Bantul 1996-2001 oleh Mendagri, akhirnya mengundang pendapat di luar kalaangan DPRD Bantul sendiri. Kali ini yang berpendapat "cukup vocal" adalah Suwandi Danusubrata, Wakil Sekretaris DPW PPP DIY yang juga pernah menjadi anggota DPRD Bantul. Menurut pengatamannya, fraksi-fraksi di lembaga legislatif tingkat Bantul tersebut selalu menunggu bola dan tidak melakukan jemput bola.

Pernyataan tersebut disampaikan Suwandi kepada *Bernas*, Selasa (14/5) kemarin di rumahnya. Ia menanggapi persoalan jabatan Bupati Bantul yang sampai diperpanjang 1 bulan, setelah sebelumnya usulan bakal calon dari tingkat II ditolak Mendagri.

Menurut dia, dalam kasus itu tampak tidak ada keberanian dan kemandirian fraksi-fraksi untuk berpikir alternatif, meski hal itu sangat dimungkinkan.

Bahkan yang memprihatinkan ada sesuatu yang dilakukan oleh DPRD Bantul atau pihak yang terkait, sehingga tidak teragenda dalam proses pencalonan Bupati Kepala Daerah dan akhirnya berakibat fatal.

"Yang jelas, ada perbedaan kepentingan di tingkat *hidden institution* (institusi yang tersembunyi). Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu calon terkuat (Kol Iwan Supardji) sudah mendapat izin atau restu, tetapi harus mentok oleh tembok Mendagri," jelas Suwandi.

Ditambahkan, melihat adanya indikator tersebut, terbersit dengan ucapan dan sikap calon maupun anggota DPRD, sangat disayangkan. Misalnya, ia mencontohkan kutipan kalimat dari anggota DPRD Bantul, kami persrah saja kepada atasan dan kami-kami ini (DPRD) hanya boneka yang harus tunduk pada kemauan Ki Dalang.

Invisible hand
Dalam mekanisme pencalonan

an, pemilihan, dan pengajuan Bupati Kepala Dati II, peran DPRD secara formal cukup signifikan. Tetapi, tidak demikian dalam praktiknya. Banyak *invisible hand* atau kekuatan tersembunyi yang ikut mempengaruhi proses pencalonan.

"Dan hal ini sangat sulit dideteksi dari mana datangnya. Sehingga tidak jarang terjadi tari-k-menari antara kebijaksanaan pusat dan aspirasi daerah, bahkan penolakan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bantul saat ini," ujarnya.

Karena lebih condong kepada fungsi kepala wilayah, maka sebelum ada kata sepakat dari perintah pusat, jangan harap DPRD II melalui fraksi-fraksi bakal mengajukan calonnya, apalagi yang sesuai dengan aspirasi daerah.

"Sekali lagi, peran DPRD II hanya sebatas memberikan dukungan kepada bakal calon dari pusat guna memenuhi kriteria dukungan masyarakat sebagai prasyarat untuk bupati dalam

kapasitasnya sebagai kepala daerah otonom," tandasnya.

Namun demikian, karena DPRD II merupakan aktor tunggal di atas panggung pemilihan, sudah seharusnya DPRD II pandai mengantisipasi dengan berbagai tawar-menawar dalam artian positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Antisipasi tersebut antara lain, DPRD II melaksanakan apresiasi atas pelaksanaan program perintah dan pembangunan daerah secara jujur, adil dan obyektif tanpa bermaksud menjatuhkan atau memuji. DPRD mensosialisasikan hasil apresiasinya kepada masyarakat secara transparan lewat infrastruktur politik, seperti ormas, orsospol, OKP, dan lainnya.

Kemudian dalam sosialisasi tadi DPRD sekaligus melakukan *public hearing* kepada masyarakat tentang sejauh mana kehendak masyarakat dalam hal calon bupati yang akan datang. (jok/saf)

Slakan Mendagri karena Ada Restu dari Pangab

kemarin, DPRD Bantul ma surat Mendagri soal calon Bupati Bantul 01. Dalam surat kawat nomor X.131.34/1199/ al 1 Mei 1996 tersebut ada Kol Inf Iwan Supardji il calon yang kini Ketua id. Dalam surat itu tidak mendapat restu dari I. Sedangkan 2 bakal calon disebut dalam surat itu.

an sat, diterimanya surat gakan kalangan dewan Apalagi anggota DPRD ihu adanya penolakan itu justru dari berita *Bernas* (5). *Bernas* sendiri mempe si tersebut dari Assekwilda taprajaan DIY, Drs Sud-

Seberapa kali diberitakan, 3 Bupati Bantul 1996-2001 ada Iwan Supardji, Drs Su-giyah mbantu Bupati Wilayah jab BA (Pembantu Bungah). Sedangkan batas atan bupati periode seka anggal 10 Mei 1996 (tinggal

Iendagri tersebut, kemarin diri oleh Ketua DPRD Bantul, Sugema. Ketua dewan ini da enda DIY dan bertemu Assek NY, Drs Sudomo Sunaryo. Hari ya (Senin, 6/5), DPRD Bantul itusan untuk mengambil su it di Pemda I, namun tidak an hasil...

Igemah didampingi Wakil Ke antul, Drs Maryono, kepada *Yogyakarta Post* menjelaskan, de ndapat restu dari Pangab, akan melakukan penjarilan bupati lagi. Ia menjelaskan mendapat restu Pangab Supardji.

warga masyarakat kembang spirasinya melalui saluran ada. Sehingga ditemukan epat untuk menjabat Bupati datang.

sudah tersirat melalui ma fraksi bahwa Bupati Bantul diharapkan dari figur ABRI, SRI di Bantul akan minta pe ri Pangab. "Soal siapa nanti na bakal muncul akan kelihatan enjaringan. Silakan masyarakat an aspirasinya. Yang jelas da nan bupati, kita akan mulai wal la," tutur Kamil.

Pejabat sementara

Bila sampai 10 Mei belum ada bupati daerah yang baru, maka pejabat ini wewang (bupati lama) dapat memperpanjang masa jabatan paling lama 1 bu-

lan. Dan bila perpanjangan waktu itu belum cukup, maka ditetapkan seorang pejabat kepala daerah atau Pjs (Pejabat sementara) yang pengangkatannya oleh Mendagri. Sesuai Inmendagri nomor 4 tahun 1995, Ymt Bupati ini paling lama 6 bulan.

Sedangkan beberapa anggota dewan di Bantul yang enggan disebut-jatidirinya mengungkapkan, pihaknya merasa gagal mengantisipasi terjadinya Ymt Bupati. "Jelas tidak mungkin waktu yang tinggal tiga hari ini digunakan untuk penjarigan, dilanjutkan proses permohonan restu ke Mendagri kemudian pemilihan dan pengajuan permohonan persetujuan Mendagri serta langsung pelantikan," kata salah seorang anggota dewan.

Ada juga pemikiran dari beberapa anggota dewan, karena prosesnya cukup lama dan lebih rumit, maka akan lebih cepat dan mudah kalau bupati di Bantul dijabat dari sipil. "Tapi kita wajib berusaha

bisa mengawinkan aspirasi bawah untuk memilih kepala daerah dengan yang diinginkan pusat untuk jabatan bupati," tutur anggota dewan itu.

Kepala daerah dipilih rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga legislatif, sedangkan bupati merupakan orang pusat yang ditempatkan di daerah. Dan, kepala daerah serta bupati itu hanya dijabat oleh satu orang.

Sebelumnya, mantan Dekan Fisipol UGM Drs Joseph Riwu Kaho MPA juga menanggapi tradisi jabatan bupati di Bantul harus dar ABRI. "Saya belum tahu apa nilai strategis Bantul. Kalau selama ini banyak dipimpin militer, mestinya ada nilainya (strategis), ya," ujarnya sam-bil tertawa.

Namun disambungnya, siapa pun yang menjadi Bupati Bantul, entah itu militer atau sipil, tidak penting, karena yang utama adalah sikap akomodatif bupati yang bersangkutan. (ado/jok/saf)

Muncul 4 Nama dari ABRI

Bantul, Bernas

Setelah bakal calon Bupati Bantul 1996-2001 ditolak Mendagri, kini muncul 4 nama yang disebut-sebut sebagai pengganti Iwan Supardji. Mereka adalah Kol Art H Sri Roso Sudarmo (bupati sekarang), Kol Inf Moesanip (mantan Dandim Bantul, kini Staf Operasi Mabes ABRI), Kol Inf Suryadi (Kodam IV/Diponegoro), dan Kol Inf Sugihardjo (Ketua DPRD Magelang).

Munculnya 4 nama tersebut, karena oleh masyarakat sudah dinilai pantas. "Jadi tidak salah kalau kita menetapkan mereka. Sebab semuanya sudah dikenal di kalangan masyarakat Bantul," jelas sumber Bernas di DPRD Bantul, Selasa (7/5).

Sri Roso Sudarmo dan Moesanip sama-sama sudah dikenal di kalangan masyarakat Bantul. Sedangkan Suryadi dan Sugihardjo dinilai sudah tahu banyak tentang kondisi Bantul.

Entah ada kaitannya dengan persoalan tersebut, sejak Senin (6/5) Sri Roso Sudarmo berada di Jakarta untuk urusan tugas. "Saya kurang mengetahui acara Pak Bupati ke Jakarta. Sehingga jangan tanyakan pada saya," kata jelas Kabag Pemerintahan Pemda Bantul, Drs Prapti Wanggono, kepada Bernas di Balai Desa Sriradeng, Sanden.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bantul H Kamil Sugema menjelaskan, pihaknya bisa memahami kalau masyarakat Bantul masih menghendaki figur ABRI untuk jabatan bupati. Sebab daerah ini nyaris sama dengan Kodya Yogyakarta yang walikotanya juga dari ABRI. Sayangnya, ia tidak menjelaskan mengapa harus dari ABRI.

"Soal keempat nama yang sekarang ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat itu, jauh hari sebelumnya sudah kami dengar. Bahkan 3 dari 4 nama itu sudah pernah dicalonkan dan masuk dalam catatan kami," jelas Kamil Sugema.

Tentang peluang Sri Roso Sudarmo, Kamil tidak mengatakan secara tegas. Hanya dikatakan, pada prinsipnya semua bakal calon berpeluang sama menjadi bupati. Sehingga pihaknya rasanya kurang etis kalau menyebut nama figur secara jelas.

"Apalagi untuk urusan ini yang penting peranan adalah pusat. Sedangkan DPRD II hanya menerima masukan dari masyarakat, sekaligus mengusulkannya," tandasnya.

Sementara itu Sekretaris FKP DPRD Bantul, Pitaya SH, secara terpisah di rumahnya menambahkan, 4 nama dari ABRI tadi semuanya memang pantas diusulkan untuk bisa menjadi bupati.

"Yang jelas, yang lebih tepat menentukan pertamakali adalah Fraksi ABRI. Sedangkan FKP siapnya hanya mempertimbangkan, memberikan dukungan serta menyertuji pilihan FABRI," jelas Pitaya.

Wakil Ketua FPDI DPRD Bantul, Heru Sumaretno SH, memperkirakan, meskipun 4 nama tadi berpeluang sama, tetapi peluang paling besar dimiliki Moesanip. Karena, ketika menjadi Dandim Bantul, Moesanip dikenal terbuka dan dekat sia-pa berbagai kalangan.

"Namun demikian, apakah ia (Moesanip) mau dicalonkan menjadi bakal calon atau tidak, kita meski harus menunggu informasi lanjut dari ia," tambah Heru Sumaretno. (saf/jok)

Penolakan Calon Bupati Bantul oleh Mendagri

DPRD Bantul Merasa Dipingpong Tingkat

Bantul, Bernas

DPRD II Bantul merasa "dipingpong" oleh Pemda IDIY. Lembaga tersebut Senin (6/5) kemarin mengirim utusan ke Pemda DIY untuk mencari kejelasan soal penolakan bakal calon Bupati Bantul 1996-2001, namun tidak memperoleh jawaban memuaskan. Surat penolakan dari Mendagri tersebut bahkan tidak boleh dilihat oleh utusan tadi, alasannya sedang dipelajari di tingkat provinsi.

Informasi tersebut diperoleh *Bernas* dari salah seorang anggota DPRD Bantul, Senin (6/5). Seperti diberitakan harian ini, nama bakal calon Bupati Bantul yang sudah dikirimkan wakil rakyat di Bantul kepada Mendagri melalui Gubernur, ditolak oleh Mendagri. Tiga calon itu adalah Kol Inf Iwan Supardji (kini Ketua DPRD Sragen), Drs Sugiyat Syam Sudjono (Pembantu Bupati Bantul Wilayah Barat), dan Sartidjab BA (Pembantu Bupati Bantul Wilayah Tengah). Sedangkan batas akhir masa jabatan bupati sekarang tanggal 10 Mei 1996.

"Utusan dari DPRD itu bahkan tidak boleh melihat surat penolakan tersebut. Katanya, sedang dipelajari di tingkat provinsi," jelas sumber *Bernas* itu.

Secara terpisah, Ketua DPRD Bantul, H Kamil Sugema, tadi malam menegaskan bahwa surat penolakan itu belum diterima pihaknya. "Saya di kantor sampai pukul 14.00. Dan sampai saat ini saya belum menerima surat (penolakan) itu. Kalau ada yang bilang sudah sampai di Bantul, itu salah," katanya tadi malam sekitar pukul 20.00.

Tentang hal tersebut, tadi malam *Bernas* juga minta penjelasan Assekwilda IBidang Kelewatprajaan DIY, Drs Sudomo Sunaryo. Menurut dia, seharusnya surat penolakan tersebut sudah dikirim ke DPRD Bantul Senin siang

kemarin.

"Pagi hari kemarin, Pak Sekwilda (Drs H Suprastowo) sudah menelepon ke DPRD Bantul menjelaskan isi surat itu. Kemudian siangnya, surat tersebut baru akan dikirim oleh Biro Tata Pemerintahan. Lha kalau belum sampai di DPRD Bantul, akan saya tegur Biro Tata Pemerintahan. Masak Yogyakarta-Bantul sehari semalam," jelasnya.

Menurut Sudomo Sunaryo, antara dia dengan Sekwilda Drs H Suprastowo dan Kepala Biro Tata Pemerintahan sudah bertemu membahas surat Mendagri tersebut. Setelah itu dibuatkan berita acara pengiriman. "Jadi bukan dipelajari. Lha wong suratnya sudah jelas," katanya.

Belum diterimanya surat penolakan dari Mendagri tersebut oleh DPRD Bantul juga dibenarkan Wakil Ketua FPDI setempat, Heru Sumaretno SH. Mestinya, kata Heru, Pemda I DIY bertindak bijaksana soal surat tersebut, bukannya malah seakan-akan mempingpong. "Hal ini menyebabkan kami prihatin," ujar Heru.

Sedangkan 2 anggota FKP DPRD Bantul, HM Aziz Umar BA dan Sadikan BA, justru tidak mau berkomentar. "Bagaimana kami bisa berkomentar, lha wong suratnya saja kami belum pernah melihat," jelas Aziz.

Tersenyum dan pasrah

Kemarin juga, *Bernas* berhasil menemui 2 bakal calon dari 3 nama yang ditolak Mendagri. Dua bakal calon itu adalah Drs Sugiyat Syam Sudjono dan Sartidjab BA. Sugiyat yang ditemui di rumahnya di Gunungsempu, Kasihan, Bantul, petang kemarin malah tersenyum ketika ditanya soal penolakan itu.

"Terus terang, saya belum tahu kalau saya dinyatakan gagal sebagai bakal calon. Sebab

sampai petang ini saya belum mendapatkan pemberitahuan soal penolakan tersebut. Kalau memang penolakan itu ada, yang ngak apa-apa," jelas Sugiyat.

Sebagai pegawai negeri sipil, ia mengaku siap menghadapi segala risiko. Apalagi masuknya dia dalam daftar bakal calon bukan kemauannya, melainkan aspirasi rakyat, tokoh masyarakat, dan ulama. "Sehingga kalau disetujui ya syukur, kalau ditolak *kula manut mawon*," tambahnya.

Sedangkan Sartidjab justru mengakui pasrah. "Mendagri memang berwenang untuk me-

nolak calon yang diusulkan dewan, dan itu sekarang urusan dewan di Bantul bukan urusan saya," tutur Sartidjab.

Ia mengaku sudah mendapat izin dari Bupati Bantul selaku atasannya dalam pemerintahan, untuk dicalonkan diri sebagai bupati. Pejabat ini juga sudah pernah dihubungi oleh organisasi politik (orpol) untuk dicalonkan sebagai bupati. Kemudian Sartidjab menyanggupinya.

Ia mengatakan, mekanisme pencalonan bupati tidak sama dengan pencalonan kepala desa. Sehingga, untuk pencalonan bupati tersebut

Drs Joseph Riwu Kaho MPA : DPRD Tak Bisa Bacakan Kemauan Pusat

Yogya, Bernas

Penolakan calon Bupati Bantul oleh Mendagri Yogie SM, menurut peraturan memang hak Mendagri atau pemerintah pusat. Terjadinya penolakan itu bisa jadi karena DPRD Tingkat II Bantul tidak bisa membaca keinginan Pusat. Penilaian ini dikemukakan mantan Dekan Fisipol UGM, Drs Joseph Riwu Kaho MPA, ketika dihubungi *Bernas* di diamanya semalam.

Itu memang hak Mendagri. Kalau ada orang yang diajukan sebagai calon bupati tidak disetujui, Mendagri menurut aturan, ya harus mengembalikan lagi. Dan selanjutnya DPRD Tingkat II harus melakukan konsultasi lagi untuk mencaricalon lain," papar pengamat administrasi pemerintahan ini.

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan UGM ini, semua pihak harus memahami bahwa bupati kepala daerah merupakan alat pusat seuh daerah untuk memilihnya. "Era itu sudah berganti karena sekarang bupati adalah alat daerah sekaligus alat Pusat. Kepentingan keduaanya harus seimbang," timpalnya.

Begitu duduk perkarnya," kata Joseph.

Perkara bahwa calon Bupati Bantul itu dicideng dengan susah payah oleh DPRD II, Joseph Riwu Kaho tidak memungkirkannya. "Memang DPRD itu menjalankan aspirasi dari daerah. Tapi harus dipahami bahwa calon yang dianggap terbaik bagi daerah belum tentu dianggap baik oleh pemerintah Pusat," jelasnya.

Malah dikatakan, dalam pemilihan calon bupati, DPRD hendaknya jangan melihat kepentingan daerah saja, tapi juga memahami kepentingan Pusat. "Disinilah ruhnya terjadinya *understanding* (kesalahpahaman) antara DPRD Bantul dan Mendagri. DPRD Bantul tidak bisa membaca keinginan dari Pusat," tutur Joseph.

Joseph lalu membandingkan pada tahun 1950-an di mana kepala daerah hanya sebagai alat daerah, sehingga adalah kewenangan penuh daerah untuk memilihnya. "Era itu sudah berganti karena sekarang bupati adalah alat daerah sekaligus alat Pusat. Kepentingan keduaanya harus seimbang," timpalnya.

Joseph Riwu Kaho selanjutnya menyarankan agar DPRD pandai-pandai "menjerat" kepentingan Pusatnya.

but terserah wakil rakyat yang...
"Saya kan tidak bisa mendapat bupati begitu saja, mekanismenya tersendiri," tuturnya.

Ketika ditanyakan kalau setelah ada penolakan dari Mendagri tak banyak komentar. Tapi juga masih ada yang menginginkan dilantik bupati. Sesuai sumpahnya, menjadi PNS, maka pejabat ini ditempatkan di mana saja dalam demei pembangunan negara. (ad)

kan agar DPRD pandai-pandai "menjerat" kepentingan Pusatnya dipadukan dengan kepentingan Pusat.

Menurut penilaiannya lagi di Bantul selain DPRD tidak bisa penting Pusat, juga sebaliknya mau omong-omong apa keinginan Pusat.

Hal itu, kata Joseph lebih jauh dihatkan arah bahwa Pusat belum benar-benar sepenuhnya kepada daerah. Pusat maunya tetap melakukan dan *controlling* dengan ketat.

"Kita omong soal otonomi dan makin luas, tapi pemerintah Pusat masih enggan. Katanya *secular* sudah longgar, tapi ternyata Pusat tidak bisa dilepaskan beginya, ya, kayak layangan itu, kaitan penerus ditarik lagi," katanya.

Seharusnya, katanya lagi, kalau berkemauan melaksanakan otonomi pemerintah Pusat jangan tercampuri. (ado)